

Korban Lumpur Lapindo Enam Hari Bertahan di DPRD

Hari pertama Ramadan tidak menyurutkan semangat korban lumpur Lapindo memperjuangkan hak atas tanah mereka yang terendam lumpur.

Heri Susetyo

PULUHAN orang duduk dengan menggelar tikar di luar pagar Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, kemarin. Sebagian lainnya tidur-tiduran di depan gerbang.

Gedung wakil rakyat itu terkesan diblokade karena sulit bagi anggota dewan maupun pihak lain untuk masuk ke halaman.

Kemarin dini hari, mereka menyempatkan diri untuk sahur bersama dengan menu sederhana, antara lain tempe dan ikan asin.

Mereka adalah sebagian korban yang tanah dan rumah mereka sudah tenggelam akibat semburan lumpur. Hingga kemarin, telah enam hari dan lima malam para korban itu bertahan di depan pagar Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo yang dijaga ketat oleh petugas kepolisian.

Tidak satu pun di antara mereka bisa masuk ke gedung wakil rakyat untuk mengadukan hilangnya rumah dan tanah mereka.

Korban lumpur ini nekat berunjuk rasa karena uang kontrak rumah selama dua tahun yang diberikan pihak PT Minarak Lapindo

Jaya sudah habis. "Proses pembayaran ganti rugi yang diberikan ternyata juga tersendat sejak lima bulan terakhir," ujar Laili, salah satu korban lumpur asal Desa Jatirejo.

Padahal, sesuai dengan Perpres Nomor 14 Tahun 2007, pembayaran ganti rugi tersebut sudah harus dilunasi sebelum masa kontrak rumah warga korban lumpur habis.

Warga yang berunjuk rasa itu merupakan korban yang pertama kali merasakan dampak semburan lumpur Lapindo. Mereka berasal dari Desa Renokenongo, Siring, dan Jatirejo di Kecamatan Porong, serta Desa Kedungbendo di Kecamatan Tanggulangin.

"Panasnya cuaca ketika menjalankan ibadah puasa di pinggir jalan seperti ini tidak sepanas hati ini yang sudah dikelabui Lapindo," tambah Laili.

Para pengunjung rasa ini mengutarakan belum akan menghentikan aksi sebelum tuntutan pembayaran ganti rugi korban lumpur dipenuhi seperti diatur dalam Perpres No-

mor 14 Tahun 2007.

Tanggung jawab pusat

Dalam menanggapi aksi itu, Bupati Sidoarjo Win Hendrerso berkomentar pihaknya selama ini sudah banyak berupaya agar persoalan ganti rugi warga korban lumpur bisa segera dituntaskan.

Namun, tambahnya, keputusan penuntasan persoalan ganti rugi warga diakuinnya berada di tangan pemerintah pusat.

Selaku kepala daerah tingkat II, dia hanya bisa melaporkan kepada pemerintah pusat soal perkembangan nasib warga korban lumpur di lapangan. "Maka saya mengimbau warga korban lumpur untuk tidak meneruskan aksi bertahan di depan Gedung DPRD. Silakan pulang ke rumah masing-masing."

Orang nomor satu di Sidoarjo itu pernah menyempatkan diri mengunjungi warga korban lumpur yang berunjuk rasa di depan Gedung DPRD pada Senin (9/8).

Pemkab, kata Win, memiliki keinginan yang sama agar persoalan lumpur ini selesai, seperti yang dilakukan DPRD Sidoarjo, yang membentuk Panitia Khusus (Pansus) Lumpur agar bisa lebih fokus memperjuangkan persoalan lumpur. Namun, hingga kemarin belum ada pertemuan warga dan dengan Pansus Lumpur, bupati, serta petinggi dari PT Minarak Lapindo Jaya. (N-1)

Kasus Lapindo

27 Mei 2006

Terjadi semburan gas di dekat sumur pengeboran milik PT Lapindo Brantas di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Semburan gas juga diikuti lumpur panas yang kemudian meluas ke sejumlah desa di sekitar sumur pengeboran.

Dampak

- 12 desa tenggelam
- 800 hektare lahan pertanian terendam
- 14 ribu KK kehilangan tempat tinggal
- 33 sekolah terendam dan memaksa anak kehilangan pendidikan mereka

Daerah yang Tergenang Lumpur

- Kecamatan Jabon
- Kecamatan Porong
- Kecamatan Tanggulangin
- Kecamatan Candi



Janji Pembayaran Pemerintah
Diatur dalam Perpres Nomor 14 tahun 2007, yaitu sebanyak 20% dibayar saat itu, sisanya, 80%, dibayar paling lambat sebelum masa kontrak rumah dua tahun habis.

Ganti Rugi Korban

- Angsuran yang sudah terbayar baru 60%
- Sekitar 50 ribu keluarga atau 40% warga korban lumpur Lapindo belum mendapat ganti rugi

Sumber: Tim MISidoarjoKab/Grafis: Fredy

heri@mediaindonesia.com